

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN  
PEMERINTAHAN DESA**

(Studi Kasus Pada Desa Sukoharjo Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu  
Administrasi Negara FISIP UPN “veteran” Jawa Timur



Oleh :

Aldo Aviandri

NPM. 0941010052

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
SURABAYA  
2015

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN  
PEMERINTAHAN DESA  
(Studi Kasus Pada Desa Sukoharjo Kecamatan Kayen Kidul  
Kabupaten Kediri)**

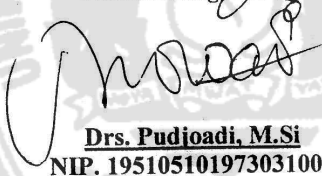
**Disusun Oleh:**

**ALDO AVIANDRI**  
**NPM. 0941010052**

**Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Skripsi**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**



**Drs. Pudjoadi, M.Si**  
**NIP. 195105101973031001**

**Mengetahui**

**DEKAN**



**Drs. Haryati, Msi**  
**NIP. 195205201981022001**

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSI  
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**  
(Studi Kasus Pada Desa Sukoharjo Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten  
Kediri)

Nama Mahasiswa : Aldo Aviandri  
NPM : 0941010052  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial Ilmu Politik

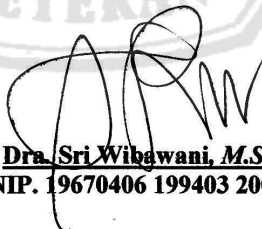
Menyatakan Bahwa Skripsi Ini Telah Direvisi Dan Disahkan  
Pada Tanggal 16 Januari 2015

Penguji I



**Dr. Lukman Arif, M.Si**  
NIP. 196411021994031001

Penguji II



**Dra. Sri Wibawani, M.Si**  
NIP. 19670406 199403 2001

Penguji III



**Drs. Pudjoadi, M.Si**  
NIP. 195105101973031001

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSI  
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**  
(Studi Kasus Pada Desa Sukoharjo Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten  
Kediri)

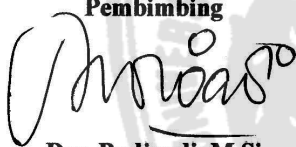
Disusun Oleh:

**ALDO AVIANDRI**  
NPM. 0941010052

Telah Dipertahankan Dihadapan Dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Administrasi Negarafakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada Tanggal : 16 Januari 2015

Menyetujui

Pembimbing

  
**Drs. Pudjoadi, M.Si**  
NIP. 195105101973031001

Tim Penguji :

1.

  
**Dr. Lukman Arif, M.Si**  
NIP. 196411021994031001

2.

  
**Drs. Sri Wihawani, M.Si**  
NIP. 19670406 199403 2001

3.

  
**Drs. Pudjoadi, M.Si**  
NIP. 195105101973031001

Mengetahui





**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**  
**KECAMATAN KAYEN KIDUL**  
**KANTOR DESA SUKOHARJO**

Jalan SMP.N 1 Kayen Kidul

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor: 900/ / 418.103.06/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DARTO

Jabatan : PJ. Kepala Desa Sukoharjo

Menerangkan bahwa:

Nama : ALDO AVIANDRI

NPM : 0941010052

Asal Perguruan Tinggi : Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Jurusan : Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Desa Sukoharjo mulai tanggal 3 Desember sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir Skripsi dengan judul “ *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Desa Sukoharjo Kecamatan kayen Kidul Kabupaten Kediri)*”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Sukoharjo, 29 Desember 2014



DARTO

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah memberi karunia, rahmat, serta hidayah-NYA. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Desa Sukoharjo Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)”.

Dalam penyusunan Skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar dan tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis akan mengucapkan terimakasih kepada Drs. Pudjoadi, M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, koreksi serta saran sehingga terselesainya skripsi ini. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ec. Hj. Suparwati, MSi, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
2. Bapak Dr. Lukman Arif, M.Si, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Susi Hardjati, M.AP, selaku Sekertaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Tukiman, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Wali penulis.

5. Ibu Dra. Sri Wibawani, M.Si, beserta Para Dosen Program Ilmu Administrasi Negara.
6. Bapak Darto Selaku Pj. Kepala Desa beserta Perangkat Desa Dan BPD Desa Sukoharjo Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri yang telah membantu penulis dalam memberikan kemudahan untuk menyelesaikan proposal ini.
7. Ayah, Ibunda, Istri dan Anak ku tercinta beserta keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini
8. Teman-temanku di Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, terima kasih banyak atas bantuannya.

Dalam Skripsi ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi pembacanya. Kekhilafan milik penulis kesempurnaan hanya milik Allah, akhir kata, ucapan maaf dan terima kasih penulis haturkan

Surabaya, 11 Januari 2015

Penulis

MBANGUNAN NASIONAL

lah.....

n.....

n.....

ulu.....

ETERAN"

iv



2.2.4 Pengawasan .....	42
2.2.4.1 Pengertian Pengawasan.....	42
2.2.4.2 Tujuan Pengawasan .....	45
2.2.4.3 Jenis-Jenis Pengawasan .....	46
2.3 Kerangka Berfikir .....	46
 BAB III METODE PENELITIAN .....	 48
3.1 Jenis Penelitian .....	48
3.2 Lokasi Penelitian .....	49
3.3 Fokus Penelitian .....	50
3.4 Sumber Data .....	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	52
3.6 Teknik Analisa Data .....	54
3.7 Keabsahan Data.....	56
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	 60
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	60
4.1.1 Sejarah Desa Sukoharjo .....	60
4.1.2 Wilayah Administratif Desa Sukoharjo .....	60
4.1.3 Kependudukan.....	63
4.1.4 Sejarah Pembangunan Desa Sukoharjo Masa Lalu dan Masa Kini.....	67
4.1.5 Keadaan Sosial Budaya.....	68
4.1.5.1 Agama.....	68
4.1.5.2 Kesehatan.....	68
4.1.6 Keadaan Ekonomi.....	69
4.1.7 Profil Pemerintahan Desa Sukoharjo.....	70
4.1.7.1 Komposisi Pegawai Pemerintahan Desa Sukoharjo.....	77
4.1.7.2 Profil Badan Permusyawaratan Desa Sukoharjo.....	78
4.2 Hasil Penelitian .....	81
4.3 Pembahasan Penelitian.....	104

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	115
5.1 Kesimpulan .....	115
5.2 Saran.....	117

## DAFTAR PUSTAKA



## ABSTRAKSI

ALDO AVIANDRI, 0941010052, PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Sukoharjo Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)

Pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan bahwa pelaksanaan Perda tersebut merupakan salah satu bentuk upaya dari BPD sebagai mitra Kepala Desa yang bertugas untuk mengawasi kegiatan pemerintahan desa, salah satunya mengawasi dalam pembuatan rancangan peraturan desa serta mengawasi pelaksanaan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan juga Alokasi Dana Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan desa, khususnya pengawasan BPD dalam pembentukan rancangan peraturan desa dan pengawasan BPD dalam pelaksanaan peraturan desa, yakni pada Perdes Desa Sukoharjo Nomor 01 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa khususnya pada APBDes dan ADD .

Metode penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan analisis model interaktif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengambil data dari sumber data yang berupa tulisan, perilaku, tindakan, peristiwa, kejadian, kata-kata. Dengan peneliti sebagai instrumen penelitian.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pengawasan BPD dalam pembentukan rancangan peraturan desa dilaksanakan dengan baik, yakni melalui rapat musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa, dan Perangkat Desa. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam PERDA Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa yakni dalam pasal 8. Pengawasan terhadap APBDes yang dilakukan oleh BPD telah dilaksanakan, hal ini diketahui dari proses pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sukoharjo tahun 2013 pada minggu keempat bulan Januari tahun 2014 yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan tokoh masyarakat. Dalam mekanisme pelaporan APBDes yang dilaksanakan Kepala Desa kepada BPD melalui musyawarah BPD. Pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) ini sudah dilakukan oleh BPD, hal ini terbukti dari Pemerintah desa yang melibatkan BPD dalam setiap rapat musyawarah desa. Dalam hal pengawasan, terdapat laporan penggunaan dana ADD yaitu laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) guna mengetahui pemakaian Alokasi Dana Desa tersebut. Sedangkan dalam pencairan dana ADD, pemerintah membaginya menjadi 3 tahap yaitu Termin 1, Termin 2, dan Termin 3.

Kata kunci: BPD, Pengawasan, Perda Kab. Kediri Nomor 9 Tahun 2006

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten.

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat” (Widjaja, 2003: 3).

Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan UU nomor 32 tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

- a. Menyenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- b. Menyenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan

peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “Development Community” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “Independent Community” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang

ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2003:166).

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.



Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta jalannya pemerintahan desa.

Didalam UU No.6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa UU ini memberikan posisi yang kuat kepada Kepala Desa. UU ini juga memperkenalkan sebuah lembaga baru yang disebut Musyawarah desa yang merupakan sebuah forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, artinya setiap desa harus menghidupkan sebuah forum politik dimana termasuk di dalamnya terdapat persoalan strategis yang harus dimusyawarahkan bersama. Dengan demikian diharapkan masyarakat desa akan berkembang menjadi komunitas yang saling melengkapi.

Dalam hal pengelolaan pembangunan, dimana UU No.6 Tahun 2014 menegaskan penggunaan dua pendekatan yang disebut “desa membangun” dan “membangun desa”. Penggabungan pendekatan itu dimaksudkan agar pembangunan desa efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi

ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, desa harus menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, yang menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pembangunan desa dilaksanakan dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Sementara itu, pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa.

Menurut UU No.6 Tahun 2014 Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang

dipimpin Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Konsistensi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Sikap Kepala Desa yang tidak otoriter dalam menjalankan kepemimpinannya menjadikan BPD mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang baik dan berpihak kepada warga. BPD merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terealisasi berdasarkan pengamatan BPD sering diikutsertakan dan didengarkan apa yang menjadi aspirasi dan masukannya. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, BPD berfungsi sebagai pengawasan kinerja pemerintahan desa, fungsi ini sangat penting guna memastikan program yang telah disepakati bersama dapat dijalankan dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun demikian pelaksanaan pengawasan ini sebaiknya dikembangkan dengan prinsip semangat kebersamaan untuk memajukan dan membangun desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kesetaraan dan komiteraan perlu lebih dikedepankan dan dikembangkan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan kelompok, golongan apalagi perorangan tertentu. Pengawasan

BPD sangat baik bila dibarengi solusi. Kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan di desa pun harus siap dikritisi sepanjang dalam konteks perbaikan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, BPD harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini penting dapat berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program yang masuk ke desa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk dapat melakukan penelitian dengan judul “ Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa Studi Kasus Pada Desa Sukoharjo Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

“Bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan desa pada Desa Sukoharjo Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri?”

### 1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan pemerintahan desa
2. Untuk mengetahui apakah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah sehingga dapat disimpulkan manfaat penelitian yaitu:

#### 1. Bagi Peneliti

Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UPN “veteran” Jawa Timur.

#### 2. Bagi Instansi

Sebagai bahan Evaluasi terhadap temuan-temuan yang ada pada proses penelitian sehingga dapat memperbaiki implementasi dari program yang ada.

### 3. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi dan literatur perbendaharaan pada perpustakaan yang dapat digunakan sebagai kajian untuk penelitian yang sejenis khususnya pada Fakultas Ilmu Administrasi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

